

DATA PIRANTI LUNAK SAT RESKRIM TAHUN 2017

A. DAFTAR PIRANTI LUNAK DALAM BENTUK UNDANG-UNDANG

NO	JENIS	NOMOR / TAHUN	TENTANG	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
1.	KUHP (KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA)			5	
2.	KUHAP (KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)			5	
3.	UNDANG-UNDANG	NO 1 THN 1974	TENTANG PERKAWINAN	1	
4.	UNDANG-UNDANG	NO 3 THN 1997	TENTANG PERADILAN ANAK	1	
5.	UNDANG-UNDANG	NO 11 THN 2008	TENTANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)	1	
6.	PERATURAN MENTERI PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI	NO 1 THN 2010		1	
7.	UNDANG-UNDANG	NO 13 THN 2006	TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	1	
8.	UNDANG-UNDANG	NO 15 THN 2001	TENTANG MEREK	1	
9.	UNDANG-UNDANG	NO 17 THN 2006	TENTANG KEPABEAN	1	
10.	UNDANG-UNDANG	NO 22 THN 2001	TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI	1	
11.	UNDANG-UNDANG	NO 23 THN 2004	TENTANG KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA)		
12.	UNDANG-UNDANG	NO 31 THN 1999	TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	1	
13.	UNDANG-UNDANG	NO 36 THN 1999	TENTANG TELEKOMUNIKASI	1	
14.	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG	NO 02 THN 2012	TENTANG PENYESUAIAN TP RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP		

1	2	3	4	5	6
15.	UNDANG-UNDANG	NO 11 THN 2012	TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK	1	
16.	UNDANG-UNDANG		TENTANG LEMBAGA SIMPAN PINJAM	1	
17.	UNDANG-UNDANG		TENTANG PERTAMBANGAN DAN MINERAL	1	
18.	UNDANG-UNDANG	NO 10 THN 2008	TENTANG PEMILU DPR, DPRD	1	
19.	UNDANG-UNDANG	NO 9 THN 2009	TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN	1	
20.	UNDANG-UNDANG	NO 9 THN 2008	TENTANG PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI SENJATA KIMIA	1	

B. DAFTAR PIRANTI LUNAK BERASAL DARI MABES POLRI

NO	JENIS	NOMOR / TAHUN	TENTANG	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
1.	PERATURAN KABARESKRIM	NO 1,2,3 THN 2014	TENTANG RENORLAKDAL PENYIDIKAN	1	
2.	HIMPUNAN PERATURAN KAPOLRI BIDANG OPERASIONAL	TAHUN 2008 SD 2010		1	
3.	KESEPAKATAN PENEGAK HUKUM CRIMINAL JUSTICE SISTEM DAN INSTANSI TERKAIT DALAM PANANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI			1	
4.	PERATURAN BERSAMA KAPOLRI DENGAN JAGUNG RI TTG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI			1	
5.	PERATURAN KAPOLRI	NO 8 THN 2009	TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAM DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI	1	
6.	PERATURAN KAPOLRI	NO 25 THN 2007	TENTANG KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PPNS	1	
7.	PERATURAN KAPOLRI	NO 10 THN 2009	TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN PEMERIKSAAN TEKNIS KRIMINALISTIK TKP DAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BB KEPADA LABFORENSIK POLRI	1	
8.	PERATURAN KAPOLRI	NO 10 THN 2010	TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BB DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1	
9.	PERATURAN KAPOLRI	NO 12 THN 2009	TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN POLRI	1	
10.	PERATURAN KAPOLRI	NO 12 THN 2014	TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN KERJA SAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1	
11.	PERATURAN KAPOLRI	NO 14 THN 2012	TENTANG MANAJEMEN TINDAK PIDANA	1	
12.	SOP BA RESKRIM POLRI		TENTANG GELAR PERKARA KHUSUS	1	
13.	SOP BA RESKRIM POLRI		TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN, MENDAGRI DAN GUBERNUR UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA	1	

1	2	3	4	5	6
14.	SOP BA RESKRIM		TENTANG PENGADUAN MASYARAKAT	1	
15.	SOP BA RESKRIM		TENTANG SUPERVISI	1	
16.	SOP PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM			1	
17.	PERATURAN KAPOLRI	NO 1 THN 2007	TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROFIL PSIKOLOGI	1	
18.	PERATURAN KAPOLRI	NO 5 THN 2011	TENTANG PENGGUNAAN JARINGAN INTERPOL DAN JARINGAN ASEANAPOL DI INDONESIA	1	
19.	PERATURAN KAPOLRI	NO 7 THN 2009	TENTANG SISTEM LAPORAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	1	
20.	PERATURAN KAPOLRI	NO 12 THN 2009	TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN POLRI	1	
21.	PERATURAN KAPOLRI	NO 15 THN 2009	TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENYIDIK TANDA KEWENANGAN DAN LENCANA PENYIDIK	1	
22.	PERATURAN KAPOLRI	NO 5 THN 2005	TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI HAKIM TP TERORISME	1	
23.	PERATURAN KAPOLRI	NO 1 TH 2005	TENTANG PEDOMAN TINDAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	1	
24.	PERATURAN KAPOLRI	NO 1 THN 2009	TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN	1	
25.	PERATURAN KAPOLRI	NO 7 THN 2005	TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM	1	
26.	PERATURAN KAPOLRI	NO 17 THN 2005	TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	1	
27.	PERATURAN KAPOLRI	NO 2 THN 2006	TENTANG OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI	1	
28.	PERATURAN KAPOLRI	NO 8 THN 2012	TENTANG IZIN SENJATA OLAHRAGA	1	
29.	PERATURAN KAPOLRI	NO 14 TH 2011	TENTANG KODE ETIK PROFESI	1	
30.	PERATURAN KAPOLRI	NO 15 THN 2006	TENTANG KODE ETIK PENYIDIK POLRI	1	
31.	PERATURAN KAPOLRI	NO 3 THN 2009	TENTANG SISTEM OPERASIONAL POLRI	1	
32.	PERATURAN KAPOLRI	NO 4 THN 2005	TENTANG PENGURUSAN TAHANAN	1	
33.	PERATURAN KAPOLRI	NO 22 THN 2011	TENTANG ADMINISTRASI-PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN	1	
34.	TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN POLRI			1	

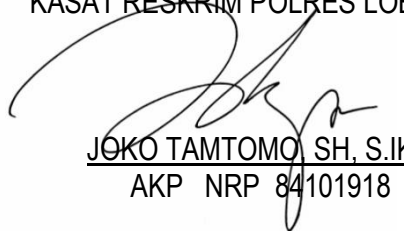
1	2	3	4	5	6
35.	PERATURAN KAPOLRI	NO 7 TAHUN 2012	TENTANG-PENDAPAT DI MUKA UMUM	1	
36.	PERATURAN KAPOLRI	NO. 23 TAHUN 2010	TENTANG SUSUNAN ORGANISASI POLRES DAN POLSEK	1	
37.	PERATURAN KAPOLRI	NO 12 TAHUN 2010	TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI	1	
38.	PERATURAN KAPOLRI	NOMOR 14 TAHUN 2007	TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS	1	
38.	PERATURAN KAPOLRI	NO 8 TAHUN 2008	TENTANG TATA CARA PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DPD DPRD	1	
39.	PERATURAN KAPOLRI	NO 6 TAHUN 2010	TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN PPNS	1	
40.	PERATURAN KAPOLRI	NO. 23 TAHUN 2010	TENTANG SUSUNAN ORGANISASI POLRES DAN POLSEK	1	
41.	PERATURAN KAPOLRI	NO 5 TAHUN 2010	TENTANG PENYADAPAN DI LINGKUNGAN POLRI	1	
42.	PERATURAN KAPOLRI	NO 3 TAHUN 2008	TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN ATAU KORBAN	1	
43.	PERATURAN KAPOLRI	NO 17 THN 2007	TENTANG TATA KERASIPAN DI LINGKUNGAN POLRI	1	
44.	PERATURAN KAPOLRI	NOMOR 16 TAHUN 2007	TENTANG TATA NASKAH DI LINGKUNGAN POLRI	1	
45.	PERATURAN KAPOLRI	NO 15 TAHUN 2010	TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL DI LINGKUNGAN POLRI	1	

C. DAFTAR JUKRAH DARI POLDA NTB

NO	JENIS	NOMOR / TAHUN	TENTANG	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
1.	SURAT TELEGRAM KAPOLDA NTB	NO : ST/256/III/2014, TGL 06 MARET 2016	TTG PELASANANAAN GEAR PERKARA	1	
2.	SURAT TELEGRAM KAPOLDA NTB	NO : ST/316/III/2016, TGL 22 MARET 2016	TTG TROBOSAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	1	
3.	SURAT TELEGRAM KAPOLDA NTB	NO : ST/856/VIII/2015, TANGGAL 06 AGUSTUS 2015	TTG KETENTUAN PAKAIAN FUNGSI RESKRIM	1	
4.	SURAT TELEGRAM KAPOLDA NTB	NO : ST/1039/IX/2015, TANGGAL 16 SEPTEMBER 2015	TTG KETENTUAN PENGGUNAAN DAN TATA CARA SERAP ANGGARAN LIDIK SIDIK	1	
5.	SURAT TELEGRAM KAPOLDA NTB	NO : ST/955/VIII/2015, TANGGAL 25 AGUSTUS 2015	TTG BANTUAN HUKUM KEPADA WARGA MISKIN	1	
6.	SURAT TELEGRAM KAPOLDA NTB	NO : ST/1055/IX/2015, TANGGAL 18 SEPTEMBER 2015	TTG ATURAN PEMERIKSAAN ANGGOTA DEWAN MAUPUN GUBERNUR	1	
7.	SURAT TELEGRAM KAPOLDA NTB	NO : ST/1088/IX/2015, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015	TTG TINGKATAN PENANGANAN PENYIDIKAN	1	
8.	SURAT KAPOLDA NTB	NO : R/2281/XII/2015/RESKRIMSUS, TANGGAL 23 DESEMBER 2015	TTG PETUNJUK DAN ARAHAN TERKAIT PENANGANAN PERDAGANGAN DAN IMPOR ILEGAL	1	

Gerung, 1 Oktober 2017

KASAT RESKRIM POLRES LOBAR


JOKO TAMTOMO, SH, S.IK
 AKP NRP 84101918